

ABSTRAK

Kevin Ferdinan Janatra. 2022, *Penegakan Hukum Sanksi Disiplin Dan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Asn Dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Pp No. 11 Tahun 2010 Tentang Manajemen ASN (Penelitian di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat).*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena dan fakta di lapangan, terkait masih adanya pelanggaran terhadap kewajiban ASN yang terjadi di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti tidak mengikuti apel pagi, setelah apel pagi ASN tidak langsung kembali ke kantor, ketika jam kerja siang banyak yang terlambat, adanya sejumlah pegawai yang pulang kantor lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan, adanya sejumlah pegawai yang berada diluar/dikantin pada saat jam kerja. Kemudian pemberian penghargaan bagi ASN di lingkungan Setda Pemprov Jawa Barat, ada beberapa permasalahan yang terjadi mulai dari pelaksanaan pemberian penghargaan melalui penilaian kinerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, akibat, penegakan dan penerapan sanksi hukuman dan penghargaan, bagi ASN di Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang ASN.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Negara Hukum sebagai Grand Theory, Teori Kepegawaian sebagai Midle Theory, dan Teori Reward and Punishment sebagai Aplikative Theory.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Analitis*. Bersifat deskriptif, karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara sistematis dan akurat mengenai penerapan Sanksi hukuman disiplin dan penghargaan bagi ASN di Setda Pemprov Jawa Barat.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Implementasi sanksi hukuman dan penghargaan bagi ASN di Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang ASN sudah dilaksanakan akan tetapi masih belum maksimal dilaksanakan dikarenakan belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut. 2) Akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada lagi Aparatur Sipil Negara yang dapat bertindak indiscipliner tanpa mendapatkan hukuman disiplin, mulai dari hukuman yang ringan, sedang dan berat.3) Penerapan kedisiplinan aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Barat sangat bergantung pada diri setiap pegawai, apabila pegawai menaati semua peraturan yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan hasil yang baik, begitu pula sebaliknya. 4) Pemberian penghargaan di Lingkungan Pemerintahan Setda Pemprov Jawa Barat sebagaimana pemberian penghargaan sesungguhnya tidak saja memberikan dampak pegawai atas prestasi kerja yang dilakukannya, melainkan berimbas pada makin meningkatnya pengakuan dan kepercayaan pejabat kepada pegawai stafnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

ABSTRACT

Kevin Ferdinan Janatra. 2022, Law Enforcement of Disciplinary Sanctions and Awards for State Civil Apparatus Reviewed from Law No. 5 of 2014 concerning Asn and Government Regulation No. 17 of 2020 Amendments to Pp No. 11 of 2010 concerning ASN Management (Research at the Regional Secretariat of the West Java Provincial Government).

This research is motivated by the phenomenon and facts on the ground, related to the still violations of ASN obligations that occur at the Regional Secretariat of the West Java Provincial Government such as not following the morning apples, after the morning apples ASN does not immediately return to the office, when many afternoon working hours are late, there are a number of employees who leave work earlier than the predetermined schedule, There are a number of employees who are outside / canned during working hours. Then the awarding of awards for ASN in the environment of the West Java Provincial Government Regional Office, there are several problems that occur starting from the implementation of awarding through performance appraisal.

The purpose of this study is to analyze the implementation, consequences, enforcement and application of punitive sanctions and rewards, for ASNs in the West Java Provincial Government Regional Office in terms of Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 17 of 2020 concerning ASN.

This research uses several theories, namely the State of Law Theory as the Grand Theory, the Personnel Theory as Midle Theory, and the Reward and Punishment Theory as the Applicative Theory.

The method used in this study is the Analytical Descriptive method. It is descriptive, because researchers try to know and present information and data factually in a systematic and accurate way regarding the application of disciplinary sanctions and awards for ASN in the West Java Provincial Government Regional Office.

The results of this study are as follows; 1) The implementation of sanctions and awards for ASNs in the West Java Provincial Government Regional Office Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 17 of 2020 concerning ASN have been implemented but are still not optimally implemented due to the ineffectiveness of the implementation of the law. 2) As a result of the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, there is no longer a State Civil Apparatus that can act indisciplinely without getting disciplinary punishment, ranging from light, moderate and severe punishments, 3) The implementation of discipline of the state civil apparatus in the Regional Secretariat of the West Java Provincial Government is very dependent on each employee, if the employee obeys all the regulations that have been set, it will get good results, and vice versa. 4) The awarding in the West Java Provincial Government Government as the actual awarding of awards not only has an impact on employees for their work achievements, but also has an impact on increasing recognition and trust of officials in their staff employees in carrying out their duties as they should.